

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di tengah-tengah perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta aspek-aspek berpengaruh yang dapat berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, sehingga dikembangkan model perencanaan strategis yang pada intinya mengacu pada visi, misi serta tujuan dan sasaran yang berbasis pada analisis lingkungan strategis.

Merencanakan berarti memilih, artinya memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik atau memilih cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya baik itu Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) serta Modal. Sumber-sumber daya tersebut sangatlah terbatas sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin dengan cara pengumpulan dan analisis data serta informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Selain itu perencanaan (*planning*) merupakan instrumen/alat untuk mencapai tujuan/sasaran. Agar tujuan/sasaran dari perencanaan tersebut dapat tercapai dengan baik maka diperlukan suatu konsep Perencanaan Strategis (*strategic of planning*).

Rencana strategis ini diharapkan dapat 1) memfasilitasi komunikasi dan partisipasi berbagai kepentingan yang berbeda dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia; 2) dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan sekaligus sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang akan dicapai. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan yang menekankan antara lain pada unsur-unsur akuntabilitas, maka segala tindakan yang dilakukan selayaknya dapat dipertanggungjawabkan, sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menekankan adanya pertanggungjawaban public atas kegiatan-kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta Instruksi Presiden 7 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu

proses yang berorientas pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sifat Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan ini: Pertama, lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis (moving target); Kedua, mengikuti kecenderungan baru; Ketiga, lebih berorientasi tindakan.

B. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repeublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 11) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategis Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Jenis Diklat Teknis;
- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Jenis Diklat Jabatan Fungsional;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 243);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dan sasaran penyusunan Renstra BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Tersedianya rumusan program dan kegiatan strategis dalam skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan program BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada pelayanan prima berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih;

4. Terwujudnya komitmen bersama diantara stakeholders terhadap program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra untuk dijabarkan melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun perencanaan strategis ini maka sistematika penulisannya terdiri dari 6 (enam) Bab yaitu :

- Bab I Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat hal-hal substansial penyusunan Renstra seperti Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- Bab II Merupakan Bab Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, Sumber Daya SKPD, Evaluasi Kinerja (Kinerja Pelayanan SKPD) serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- Bab III Merupakan Bab Perumusan Isu –isu Strategis berdasarkan Tupoksi Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan (permasalahan dari aspek pelayanan), Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD, uraian keterkaianan Renstra SKPD dengan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD.
- Bab IV Merupakan Bab Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Kebijakan, Bab ini menjelaskan tentang rencana-rencana potret kondisi masa depan yang diharapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, Strategi dan Kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah.
- Bab V Merupakan Bab Rencana Program dan Kegiatan dalam Bab ini diuraikan Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, Rencana program prioritas beserta indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VI Merupakan Bab indicator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD.
- Bab VII Merupakan Bab Penutup dari penyusunan Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan TA. 2013-2018, serta terdapat lampiran yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra ini.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9 tentang **ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI SULAWESI SELATAN**, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan berkedudukan sebagai : *“unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”*.

A. Tugas Pokok

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

B. Fungsi

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan dan pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
2. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi bidang Perencanaan dan pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
3. pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan dan pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
4. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- (1) Kepala Badan;

- (2) Sekretariat;
- (3) Bidang;
- (4) Sub Bagian;
- (5) Sub Bidang;
- (6) UPTB;
- (7) Jabatan Fungsional;

Berikut uraian lebih lanjut tentang kelengkapan dari masing-masing komponen struktur organisasi :

1. Sekretariat

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

2. Bidang

Bidang , terdiri atas :

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural.

1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:

- a) Sub Bidang Perencanaan;
- b) Sub Bidang Pengembangan.

2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, terdiri atas:

- a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Umum;
- b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif.

3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, terdiri atas:

- a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Umum;
- b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Berjenjang.

4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, terdiri atas:

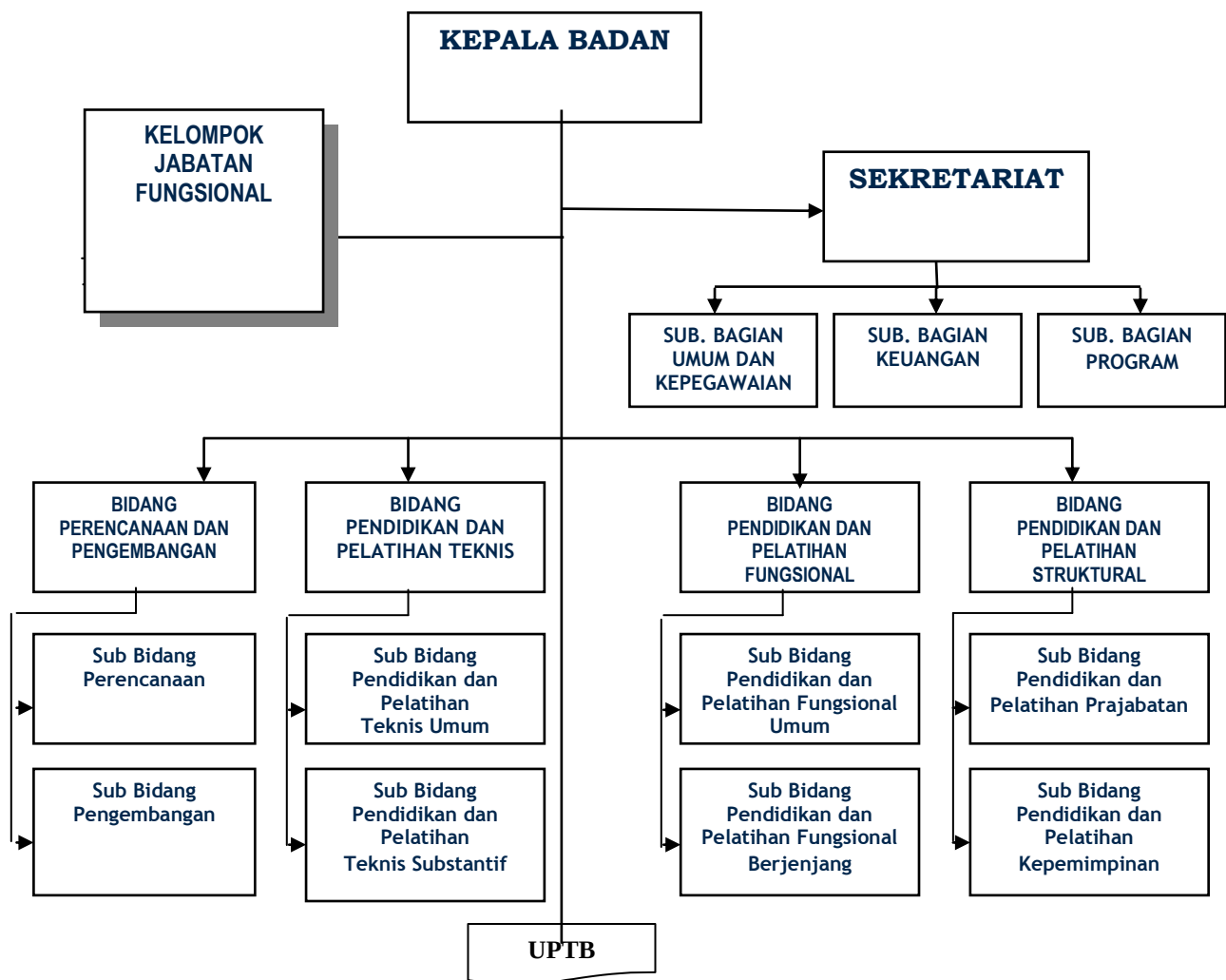
- a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
- b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

- 5) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Media Pembelajaran (MP), terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Media Instruksional dan Penilaian Kompetensi;
 - c) Seksi Multi Media Terapan
- 6) Jabatan Fungsional
 - a) Widyaiswara;
 - b) Arsiparis;
 - c) Pustakawan

C. Struktur Organisasi

Derajat kapasitas organisasi dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya tercermin dari kondisi sumber daya organisasi yang dimiliki. Ketersediaan sumber daya organisasi paling tidak meliputi konstruksi struktur kelembagaan, personil/pegawai, sarana dan prasarana, keuangan dan ketersediaan sistem informasi.

Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :



2.2. SUMBER DAYA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Guna menjamin pemenuhan tingkat kompetensi aparatur yang tersertifikasi baik dari sisi manajemen kediklatan maupun desain pembelajaran, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Sulawesi Selatan telah memiliki pengakuan atau akreditasi dari Instansi pembina diklat (LAN – RI). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN-RI No. 2047/I/13/14/2010 tanggal 13 Desember 2010 maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Sulawesi Selatan telah terakreditasi untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Diklat Pim Tingkat III dan Diklat Pim Tingkat IV.

Dengan demikian, Badan Diklat Prov. Sul - Sel sebagai institusi penyelenggara diklat aparatur/PNS berhak memfasilitasi penyelenggara diklat terutama untuk Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan yang institusi penyelenggara diklatnya belum terakreditasi. Dengan status ini hampir semua penyelenggaraan diklat di lingkup Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan telah difasilitasi oleh Badan Diklat Prov. Sul - Sel. Status lembaga terakreditasi ini juga bahkan telah berdampak pada semakin banyaknya jumlah pihak atau mitra kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi SDM terutama pendidikan dan pelatihan.

2.2.1. Pegawai/personil

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki PNS Sebanyak 103 Orang keadaan desember 2014 dengan kualifikasi pendidikan yang bervariasi sebagai berikut : Program Doktorat (S3) 4 orang atau sekitar 3.88%, Pascasarjana (S2) sebanyak 40 orang atau sekitar 38,83%, berkualifikasi Sarjana (S1) sebanyak 39 orang atau sekitar 37,86%, berkualifikasi sarjana muda (D3) sebanyak 6 orang atau sekitar 5,83% dan sebanyak 14 orang atau 13,59% yang berkualifikasi SLTA kebawah. sedangkan jumlah PNS Badan menurut tingkat Pendidikan dan Golongan dapat digambarkan pada tabel berikut:

**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT KUALIFIKASI JENJANG PENDIDIKAN FORMAL PADA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROV. SUL SEL KEADAAN 31 DESEMBER 2014**

No	Tingkat Pendidikan	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV					Jumlah Total	Ket.
		a	b	c	D	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	SLTP	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3	SLTA	-	-	-	-	5	7	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	13	
4	Sarmud/Akademi (D3)	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	6	
5	Sarjana (S1)	-	-	-	-	-	-	1	-	3	14	6	9	3	1	-	1	-	39	
6	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	14	8	3	3	-	40	
7	Doktoral (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	4	
	JUMLAH	-	1	-	1	5	7	2	1	8	18	12	17	18	10	3	5	-	103	

Dari jumlah PNS yang ada pada Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dilakukan pendayagunaan dengan mendistribusikan kedalam bidang-bidang, unit kerja organisasi. Distribusi PNS menurut bidang dan Setban dapat diuraikan menurut gambaran pembagian personil secara kuantitatif baik PNS laki-laki maupun perempuan.

Didalam pendistribusian PNS tentunya banyak variabel yang mempengaruhi yakni persyaratan formal, diantaranya disesuaikan dengan kompetensi PNS dengan jabatan yang tersedia, namun secara depakto selama ini sulit dicapai disemua lini pemerintahan karena berbagai normatif yang ada tidak saling terkait secara berjenjang sehingga masih banyak dipengaruhi oleh faktor non teknis.

Adapun distribusi PNS menurut jenis kelamin pada masing-masing bidang, sekretariat, jabatan struktural dan widyaiswara/tenaga pengajar dapat dilihat pada uraian masing-masing tabel berikut ini :

**DATA JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MENURUT GOLONGAN/RUANG DAN JENIS KELAMIN KEADAAN 31 DESEMBER**

No	Menurut Golongan/ Ruang	Unit Kerja																Jumlah Total
		Kepala Badan		Sekretariat		Bidang Renbang		UPTB		Bidang Diklat Teknis		Bidang Diklat Fungsional		Bidang Diklat Struktural		Widya- iswara/Fun gsional		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Gol. I	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Gol. II	-	-	3	1	1	-	1	-	2	1	-	-	3	-	-	-	14
	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	4
	b	-	-	3	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	8
	c	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Gol. III	-	-	15	10	2	3	2	4	2	2	2	6	-	6	1	-	55
	a	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	7
	b	-	-	7	3	-	1	-	2	1	1	-	3	-	1	-	-	19
	c	-	-	1	3	1	1	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	12
	d	-	-	4	3	1	1	-	1	1	-	-	2	-	3	1	-	17
4	Gol. IV	1	-	2	1	2	1	2	2	1	1	1	-	1	1	11	5	32
	a	-	-	1	1	2	1	1	2	1	1	-	-	-	1	4	1	16
	b	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4	3	11
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
	d	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	e																	
JUMLAH		1	-	21	13	5	4	5	6	5	4	3	6	4	7	12	5	103

**DATA JUMLAH TINGKAT ESELON DAN PEJABAT MENURUT JENIS KELAMIN PADA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN KEADAAN 31 DESEMBER 2014**

No	Jabatan				JUMLAH Job Pegawai												Jumlah (8+11+14+17)	Keterangan
	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Widyaiswara				
					P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	-	1	6	14	1	-	1	6	-	6	5	9	14	12	5	16	38	

**DATA JUMLAH TENAGA PENGAJAR / WIDYAISWARA TETAP MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEADAAN DESEMBER 2014**

No	Tingkat Golongan	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Keterangan
		SM/D III	S1	S2	S3	Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan III							
	A	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	
	C	-	-	-	-	-	-	
	D	-	1	-	-	1	-	Widyaiswara Muda 3 orang
2	Golongan IV							
	A	-	1	3	1	4	1	Widyaiswara Madya 13 orang
	B	-	1	5	1	4	3	
	C	-	-	3	-	2	1	
	D	-	-	-	1	1	-	Widyaiswara Utama 1 orang
	E	-	-	-	-	-	-	
Jumlah			3	11	3	12	5	

2.2.2 . Sarana dan Prasarana

❖ *KAMPUS - I*

Dukungan sarana dan prasarana kediklatan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah seluas 6.480 M² dengan sertifikat No. 55 tanggal 28 September 1987 milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bangunan di atas tanah tersebut yaitu Bangunan Perkantoran, Aula, Asrama, Ruang Belajar, Ruang Diskusi, Perpustakaan, Kantin, Ruang Studio dan Dapur serta fasilitas olah raga, Ruang Fitnes, Mesjid dan tempat parkir.

Asrama yang dipersiapkan pada gedung C Lantai II memiliki kamar 12 buah dengan kapasitas perkamar sebanyak 3 orang dan Lantai III memiliki kamar sebanyak 9 kamar dengan kapasitas 4 orang perkamar sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 72 orang dan Asrama yang disiapkan pada Gedung D Lantai II, III, IV, V memiliki 32 kamar dengan kapasitas 2 orang perkamar sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 64 orang. Sedangkan ruang belajar pada Gedung C sebanyak 3 ruangan dengan kapasitas 40 orang per-ruangan, Aula pada gedung B Lt. II sebanyak 1 ruangan dengan kapasitas 350 orang dan aula gedung D Lt. I dengan kapasitas 60 orang. Kemudian terdapat ruang diskusi/rapat sebanyak 3 Unit masing-masing pada gedung A Lt. III sebanyak 2 ruangan, Gedung A Lantai I sebanyak 1 ruangan dengan daya tampung masing-masing 20 orang. dan 1 ruangan rapat pimpinan pada gedung A Lt. I. selain itu terdapat pula ruangan kantin/makan pada gedung B Lt. I dan gedung E Lt. I, kantin dharma wanita dan ruang koperasi serta ruang perkantoran pada gedung A Lt. I, II dan III.

Jika memperhatikan tingkat volume kegiatan penyelenggaraan diklat selama ini dibanding dengan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana kediklatan yang ada sudah cukup terpenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan. Hanya saja sebagian besar peralatan kantor yang dimiliki memiliki usia teknis yang cukup lama sehingga diperlukan pemeliharaan atau peremajaan agar dapat dipergunakan secara optimal.

Adapun jumlah dan jenis sarana/prasarana yang dimiliki saat ini dapat diuraikan pada tabel berikut :

1. DAFTAR JUMLAH LUAS AREAL TANAH DAN BANGUNAN

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi	Ket
1	2	3	4	5
1	Tanah	6,480	Jl. ST Alauddin No. 105 B Makassar	Sertifikat No. 55 tgl 28 Sept 1987 di bangun TA. 1983/1984
2	Bangunan	4.000	- sda -	
3	Non Bangunan/Pelataran	1.500	- sda -	
4	Belum di manfaatkan	695	- sda -	

2. DAFTAR JUMLAH RUANGAN BELAJAR (KELAS/DISKUSI)

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Kelas Gedung C Lt. I	3 unit	96 66 66	40 30 30	Di bangun TA.1983/1984 Sda Sda
2	Ruang Aula Gedung B Lt. II	1 unit	35 x 25	500	Di Renovasi T.A. 2011
3	Ruang Server Jaringan Data Base / Informasi Gedung B Lt. I	1 unit	2 x 2,5	3	Di Renovasi T.A. 2011
4	Ruang Kelas Gedung D Lt. I	1 unit	6 x 10	100	Di bangun TA. 2005
9	Ruang Perpustakaan Gedung D Lantai I	1 unit	5 x 10	30	Di bangun TA. 2005
10	Ruang Audio Visual (Studio) Gedung E Lantai II	1 unit	7 x 15	30	Di bangung TA. 2009

3. DAFTAR JUMLAH ASRAMA DAN KAPASITAS

No	Uraian/jenis Asrama	Jumlah Kamar/ Buah	Ukuran/ Per kmr (M ²)	Kapasitas/ Per kmr (org)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Lantai II Ged. C	12	12,5	3	36	
	Lantai III Ged. C	9	24,00	4	36	
2	Latai II – V Gedung D	32	21,78	2	64	
JUMLAH		53	-	-	136	

4. DAFTAR JUMLAH RUANGAN MAKAN / KANTIN

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Makan Gedung B Lt. I	2 ruangan	6 x 20 m	150 org	
			6 x 10 m	40 org	
2	Ruang Makan Gedung D Lt. I	1 ruangan	9,9 x 5,1 m	50 org	
3	Ruang Binatu/Laundry Badan Diklat Gedung A Lantai I	1 unit	4,5 x 10 m	-	
4	Ruang Kantin Koperasi Badan Diklat Gedung E Lantai I	1 unit	6 x 13,20 m	20 org	
5	Ruang Koperasi Gedung E Badan Diklat Lantai I	1 unit	3,1 x 3,4 m	5 org	

5. DAFTAR JUMLAH RUANGAN BANGUNAN LAINNYA.

No	Uraian Ruangan	Jumlah	Luas per Ruangan	Jumlah Kapasitas	Ket
1	2	3	4	6	7
I.	GEDUNG PERIBADATAN	1 unit	8 x 8		Th. 2008
II.	GEDUNG PERKANTORAN	1 unit			Dibangun TA. 1983/1984
	dengan rincian, sbb :				
	1. Gedung A Lt. I	8 ruangan			
	- Kepala Badan	1 ruangan	6 x 8		
	- Sekretaris Badan	1 ruangan	6 x 6,5		
	- Kasubag Program	1 ruangan	6 x 6,5		
	- Kasubag Keuangan	1 ruangan	6 x 8		
1	2	3	4	6	7
	- Kasubag Umum dan Staf	1 ruangan	6 x 10		
	- Staf Sub. Bagian Kepegawaian	1 ruangan	6 x 10		
	- Pemegang Kas	1 ruangan	2 x 4,5		
	- Ajudan	1 ruangan	4 x 6		
	- Gudang Bend. Barang	1 ruangan	1,5 x 2		
	2. Gedung A Lt. II	7 ruangan			
	- Staf Bidang Diklat Struktural	1 ruangan	16 x 8		
	- Kabid. Diklat Struktural	1 ruangan	3 x 8		
	- Kabid. Perencanaan & Pengembangan	1 ruangan	3,5 x 8		
	- Ruang Arsip Sub Bag. Kepegawaian	1 ruangan	2 x 4,5		
	- Staf Bidang Perencanaan & Pengembangan	1 ruangan	8 x 8		
	- Ruang Widyaiswara	1 ruangan	17 x 8		

	3. Gedung A Lt. III	5 ruangan			
	- Kepala Bidang Diklat Teknis	1 ruangan	6 x 3,60		
	- Staf Bidang Diklat Teknis	1 ruangan	6 x 7,20		
	- Kepala Bidang Diklat Fungsional	1 ruangan	6 x 3,60		
	- Staf Bidang Diklat Fungsional	1 ruangan	6 x 7,20		
	- Ruang Arsip	1 ruangan	3 x 8		
	JUMLAH	2 unit / 20 ruangan			

❖ **KAMPUS - II**

Dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan kediklatan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi milik Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan pada Kampus II Ex IPDN secara keseluruhan adalah seluas 7.414 M² sesuai dengan Lampiran Nomor Keputusan Gubernur Sulawesi` Selatan No. 1679/VIII/Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bangunan di atas tanah tersebut yaitu Bangunan Perkantoran, Aula, Asrama, Ruang Belajar, Ruang Diskusi, Kantin, Ruang Fitnes, Ruang Karaoke, Dapur serta fasilitas olah raga, Mesjid dan tempat parkir.

Asrama yang dipersiapkan memiliki kamar 24 buah dengan rincian sebagai berikut : Asrama Garuda (Putra) Lantai I sebanyak 2 barak dengan kapasitas tempat tidur masing-masing sebanyak 10 buah dan Lantai II sebanyak 2 barak kamar dengan kapasitas tempat tidur masing-masing 10 buah, sehingga daya tampun untuk Asrama Putra sebanyak 40 orang. Sedangkan Asrama Putri pada Lantai I terdapat 1 barak dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 11 orang dan Lantai II terdapat 1 barak dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 14 orang, sehingga daya tampun untuk asrama Putri sebanyak 25 orang. Asrama untuk Vavilium terbagi 4 unit, masing-masing unit memiliki 3 kamar tidur dengan kapasitas tempat tidur masing-masing 5 bua sehingga daya tampung untuk Vavilium sebanyak 20 orang.

Sedangkan ruang belajar terdiri dari : Ruang belajar kepramugarian sebanyak 2 unit dan satu ruangan untuk Catwalk dengan kapasitas 40 orang per-ruangan, Ruang Rehat untuk pengajar dan Peserta kepramugarian 1 unit, Aula utama sebanyak 1 unit dengan daya tampung kurang lebih 300 orang, Ruangan belajar/kelas untuk peserta diklat

sebanyak 3 unit, ruang diskusi/seminar sebanyak 3 unit, Laboratorium Bahasa 1 unit dengan kapasitas 30 orang, Laboratorium Komputer 1 unit dengan kapasitas 30 orang, Ruang makan sebanyak 2 unit, Masjid, Ruang Binatu/Laundry, Ruang Tamu Pimpinan, selain itu terdapat pula Fasilitas olahraga, Ruang Karaoke, Apotek/Klinik (Fisioterapy dan Radiology), Kantin/Warkop, Fasilitas Perbankan yakni Bank SulSelbar, ATM Bank BNI, ATM Bank Mandiri masing-masing 1 unit.

Jika memperhatikan tingkat volume kegiatan penyelenggaraan diklat selama ini dibanding dengan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana kediklatan yang ada sudah cukup terpenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan. Hanya saja sebagian besar peralatan kantor yang dimiliki memiliki usia teknis yang cukup lama sehingga diperlukan pemeliharaan atau peremajaan agar dapat dipergunakan secara optimal.

Adapun jumlah dan jenis sarana/prasarana yang dimiliki saat ini dapat diuraikan pada tabel berikut :

1. DAFTAR JUMLAH LUAS AREAL TANAH DAN BANGUNAN

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi	Ket
1	2	3	4	5
1	Tanah	7,414	Jl. Cendrawasih Kel. Sambung Jawa Makassar	Sertifikat No. 24 tgl 15 Juli 1992
2	Bangunan			
3	Non Bangunan/Pelataran			
4	Belum di manfaatkan			

2. DAFTAR JUMLAH RUANGAN BELAJAR (KELAS/DISKUSI)

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Kelas / Diskusi / Seminar dan Ruang Catwalk untuk Diklat Pramugari	6 unit	7 x 8 m 7 x 8 m 7 x 8 m 7 x 6,5 m 7 x 6,5 m 7 x 6,5 m 6 x 8 m		Direnovasi T.A. 2013 Sda Sda
2	Ruang Aula	1 unit	10 x 34	300	Di Renovasi T.A. 2013

3. DAFTAR JUMLAH ASRAMA DAN KAPASITAS

No	Uraian/jenis Asrama	Jumlah Kamar/ Buah	Ukuran/ Per kmr (M ²)	Kapasitas/ Per kmr (org)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Asrama Garuda (Putra)	2 buah				
	Lantai I	2	6 x 10 m	10	20	
	Lantai II	2	6 x 10 m	10	20	
2	Asrama Putri (Depan)	2 buah				
	Lantai I	1	4 x 26 m	11	11	
	Lantai II	1	4 x 26 m	14	14	
3	Asrama Vavilium terdiri dari :					
	1. Vavilium Indira	3	3 x 3,5	2 dan 1	5	
	2. Vavilium Riska	3	3 x 3,5	2 dan 1	5	
	3. Vavilium Sofia	3	3 x 3,5	2 dan 1	5	
	4. Radisya	3	3 x 3,5	2 dan 1	5	
	JUMLAH	6 buah	-	65	85	

4. DAFTAR JUMLAH RUANGAN MAKAN, KANTIN/WARKOP, SARANA OLAHRAGA/HIBURAN, SARANA KESEHATAN DAN SARANA PERBANKAN

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Makan Utama (Ayunsri)	2 ruangan	20 x 8 m 14 x 8 m	200 org 80 org	
2	Ruang Kantin/Warkop	1 ruangan	10 x 4 m	50 org	
3	Ruang Fitnes/Karaoke	2 unit	4 x 5 m 4 x 5 m		
4	Klinik Praja Rindra Care dan Apotek Kimia Farma dengan fasilitas Fisoterapy dan Radiology	1 unit	25 x 8 m		
5	Bank SulSelBar dan Fasilitas ATM Bank BNI dan ATM Bank Mandiri	3 unit	10 x 8 m 3 x 3 m 3 x 3 m		

5. DAFTAR JUMLAH RUANGAN BANGUNAN LAINNYA.

No	Uraian Ruangan	Jumlah	Luas per Ruangan	Jumlah Kapasitas	Ket
1	2	3	4	6	7
I.	GEDUNG PERIBADATAN	1 unit	7 x 25		Th. 2013
II.	GEDUNG PERKANTORAN	1 unit			Direnovasi TA. 2013
	dengan rincian, sbb :				
	- Kepala Badan	1 ruangan	6 x 5		Sda
	- Ruang Bidang Teknis	1 ruangan	6 x 4		Sda
	- Ruang Kepala UPTB	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Eseklon IV UPTB	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruangh Staf UPTB	1 ruangan	15 x 8		Sda
	JUMLAH	2 unit / 5 ruangan			

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Ketersediaan dan dukungan sumber daya organisasi berimplikasi pada pemenuhan kinerja Badan Diklat Prov. Sulsel selama ini. Gambaran kinerja ini dapat dilihat khususnya dari pelaksanaan tupoksi Badan dalam penyelenggaraan diklat.

Berbagai kegiatan kediklatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012, baik kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di provinsi dengan dana dari APBD Provinsi, APBN dan Bantuan luar negeri maupun kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat pada kabupaten/kota se Sulawesi Selatan dengan dana dari APBD Kabupaten /kota yang bersangkutan.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut meliputi Bidang Diklat Struktural (Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III serta Diklat Pim Tk. IV dan III), Bidang Diklat Teknis, Bidang Diklat Fungsional.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas Kompetensi Teknis Aparatur Pemerintah		8.779 Orang Peserta		485	1.577	2.312	3.115	1.340	482	1.565	2.222	3.038	1.273	99,3814	99,2391	96,1037	97,5281	98,7313
2	Meningkatnya Kapasitas KompetensiFungsional Aparatur Pemerintah		910 orang peserta		200	155	255	150	150	192	154	253	148	200	96	99,3548	99,2157	98,6667	100
3	Meningkatnya Kapasitas Kompetensi Struktural/Kepemimpinan Apartur Pemerintah		2,869 orang peserta		1.518	268	636	242	205	1.340	266	379	240	170	88,274	99,2537	59,5912	99,1736	82,9268

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	10.000.000	31.265.000	86.360.000	27.000.000	1.527.000.000	25.935.000	54.640.000	86.785.000	47.220.000	969.685.000	259,35	174,76	100,49	174,89	63,50	336.325.000	236.853.000
- Hasil Retribusi Daerah	10.000.000	31.265.000	86.360.000	27.000.000	1.527.000.000	25.935.000	54.640.000	86.785.000	47.220.000	969.685.000	259,35	174,76	100,49	174,89	63,50	336.325.000	236.853.000
Belanja Daerah	18.239.874.971	17.717.021.135	19.649.527.063	21.868.007.665	22.355.747.736	16.881.771.493	16.945.423.377	17.715.156.022	21.011.371.494	21.147.768.659	92,55	95,64	90,16	96,08	94,60	19.966.035.714	18.740.298.209
- Belanja Tidak Langsung	4.550.236.382	5.507.208.775	5.849.527.063	6.970.507.665	7.755.747.736	4.377.460.252	5.270.360.361	5.684.176.799	6.543.843.664	7.431.439.968	96,20	95,70	97,17	93,88	95,82	6.126.645.524	5.861.454.409
* Belanja Pegawai	4.550.236.382	5.507.208.775	5.849.527.063	6.970.507.665	7.755.747.736	4.377.460.252	5.270.360.361	5.684.176.799	6.543.843.664	7.431.439.968	96,20	95,70	97,17	93,88	95,82	6.126.645.524	5.861.454.409
- Belanja Langsung	13.689.638.589	12.209.812.360	13.800.000.000	14.897.500.000	14.600.000.000	12.504.311.241	11.675.063.016	12.030.979.223	14.467.536.830	13.716.328.691	91,34	95,62	87,18	97,11	93,95	13.839.390.190	12.878.843.800
* Belanja Pegawai	3.368.539.850	2.956.138.800	2.633.147.550	2.382.610.000	2.641.456.250	3.197.956.550	2.840.385.800	2.188.777.025	2.342.038.600	2.432.524.900	94,94	96,08	83,12	98,30	92,09	2.796.378.490	2.600.331.175
* Belanja Barang dan Jasa	8.564.793.739	7.733.498.560	10.059.252.450	11.033.468.700	11.619.633.750	7.777.863.251	7.373.258.216	8.811.590.198	10.687.330.480	10.946.625.491	90,81	95,34	87,60	96,86	94,21	9.802.129.440	9.119.333.527
* Belanja Modal	1.756.305.000	1.520.175.000	1.107.600.000	1.481.421.300	338.910.000	1.528.491.440	1.461.446.000	1.030.612.000	1.438.167.750	337.178.300	87,03	96,14	93,05	97,08	99,49	1.240.882.260	1.159.179.098
Total	18.249.874.971	17.748.286.135	19.735.887.063	21.895.007.665	23.882.747.736	16.907.706.493	17.000.063.377	17.801.941.022	21.058.591.494	22.117.453.659	92,65	95,78	90,20	96,18	92,61	20.302.360.714	18.977.151.209

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Perumusan perencanaan strategis haruslah berangkat dari analisis lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan strategis tersebut sangat penting dilakukan mengingat efisiensi dan efektifitas program sebuah entitas sangat tergantung dari kemampuannya untuk mengikuti dan menjawab dinamika tuntutan perubahan dan perkembangan sejumlah isu sentral lingkungan strategis yang demikian cepat dan kompleks.

Dalam menganalisis lingkungan strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan, maka tentunya kita akan memandangnya dari dua aspek pendekatan, yaitu dari perspektif internal organisasi (*internal environmental scanning*) yang meliputi peta kekuatan dan kelemahan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi (*resources mapping*) di satu sisi dan pada sisi lain berangkat dari perspektif eksternal organisasi (*external environmental scanning*) meliputi perkembangan konteks administrasi pemerintahan dan sumber daya manusia aparatur saat ini, baik terhadap kondisi yang dapat dijadikan sebagai suatu peluang maupun ancaman yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian visi dan misi Badan.

2.4.1. LINGKUNGAN INTERNAL

Berdasarkan hasil analisis pencermatan Lingkungan Internal Badan Pendidikan dan Pelatihan diperoleh adanya beberapa kondisi/potensi sebagai asumsi awal yang dapat menunjukkan sebagai faktor kekuatan maupun kelemahan dalam pencapaian Visi dan Misi Organisasi, yaitu :

A. KEKUATAN/KEUNGGULAN

Adapun yang merupakan kekuatan/Keunggulan dalam pencapaian Visi dan Misi Organisasi adalah:

- (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009
- (2) Adanya dukungan APBD
- (3) Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang cukup memadai
- (4) Adanya dukungan Pimpinan
- (5) Adanya Akreditasi Program Diklat
- (6) Adanya Sistem Manajemen Mutu (SMM) dalam penyelenggaraan diklat

B. KELEMAHAN

- (1) Terbatasnya Sarana dan Prasarana

- (2) Jumlah Widyaiswara belum memadai
- (3) Kualitas Widyaiswara belum Optimal
- (4) Rendahnya anggaran
- (5) Rendahnya Kedisiplinan
- (6) Rendahnya jejaring kerjasama kediklatan dengan instansi dan lembaga lain.

2.4.2 LINGKUNGAN EKSTERNAL

Dari hasil analisis pencermatan lingkungan eksternal Badan Pendidikan dan Pelatihan ditemukan adanya beberapa kondisi/potensi sebagai asumsi awal yang dapat menunjukkan faktor peluang maupun ancaman dalam pencapaian Visi dan Misi Organisasi, yaitu :

A. PELUANG

Adapun yang merupakan kekuatan/Keunggulan dalam pencapaian Visi dan Misi Organisasi adalah:

- (1) Implementasi Pergub. Nomor 72 Tahun 2010
- (2) Adanya kepercayaan pengelola lembaga diklat
- (3) Peneraapan beberapa regulasi di bidang kediklatan
- (4) Kerjasama perguruan tinggi, pemerintah dan pihak luar negeri serta pihak ketiga
- (5) Pemanfaatan IT untuk pengembangan program kediklatan
- (6) Adanya kebijakan training rate PNS.

B. TANTANGAN/ANCAMAN

- (1) Rendahnya konsistensi instansi Pembina diklat terhadap lembaga diklat di daerah

- (2) Belum tersusunnya jenis dan jenjang kompetensi khusus lingkup pemerintah provinsi dan kab/kota
- (3) Lemahnya tingkat kepatuhan unit kerja terhadap regulasi kediklatan
- (4) Masih adanya lembaga diklat pusat/sektoral yang menyelenggarakan diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional
- (5) Masih adanya persaingan lembaga diklat non pemerintah penyelenggara diklat teknis dan fungsional
- (6) Tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Dalam mengemban tekad untuk melaksanakan tugas pokok, maka mencermati berbagai isu strategis mendapat perhatian antara lain:

- a. Kelembagaan Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan Pembangunan SDM Negara belum memperlihatkan kinerja yang optimal, hal ini yang menjadi variabel antara lain dalam pelayanan publik menunjukkan tingkat kualitas pemberian pelayanan SDM belum seiring dengan tuntutan kualitas yang diharapkan masyarakat, sehingga terkesan aparatur dalam memberikan pelayanan kapasitasnya belum memadai untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan langkah konkrit untuk meningkatkan kompetensi kapasitas aparatur melalui berbagai program kediklatan.
- b. Lingkungan strategis pemerintahan mengalami perkembangan secara dinamis dan cepat yang berdimensi global dan nasional serta kompleksitas struktur sosial, sehingga kelembagaan pemerintah daerah harus responship terhadap perkembangan yang terjadi, begitu pula keberadaan SDM pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kompetensinya seiring dan seirama dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kapasitas kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan diklat selama ini mungkin tidak memadai lagi dalam menghadapi perubahan tata nilai pergaulan global dan nasional yang begitu cepat dan kompleks, sehingga dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, untuk itu kebutuhan Pendidikan dan

pelatihan setiap aparatur perlu dilakukan secara dinamis sesuai tuntutan perkembangan lingkungan strategis pemerintahan.

- c. Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang teakreditasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan kediklatan secara profesionalisme, sehingga perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang dipersyaratkan. Diakui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai utamanya pada saat pelaksanaan kegiatan kediklatan yang bersamaan / paralel, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, untuk itu upaya yang dilakukan dengan mengusulkan secara bertahap pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan / perbaikan sarana dan prasarana yang ada agar dapat dipertahankan dan difungsikan sesuai peruntukannya.
- d. Secara umum alokasi anggaran masih kurang dibeberapa kegiatan prioritas sementara objek kegiatan yang akan ditangani masih sangat banyak jumlahnya;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Maksud dari perumusan Visi-Misi adalah tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang hendak diwujudkan oleh Kepala daerah Terpilih serta upaya-upaya yang akan ditempuh oleh Kepala Daerah Terpilih dalam dalam mewujudkannya. Tujuan dari perumusan Visi dan Misi ini adalah tersosialisasikannya tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai oleh pasangan calon pada tahun 2018 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan dan potensil yang dihadapi pada periode 2013-2018, arahan dari RPJPD Sulawesi Selatan,

serta arahan dari visi RPJMN 2010-2014, visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah:

**“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul
Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”**

Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok visi yakni pilar utama pembangunan Indonesia, simpul jejaring, dan akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut:

Pertama, Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan katahnanan, kemandirian dan kedaulatan pangan di mana Indonesia masih mengimpor beras, garam, jagung dan daging. Sulawesi Selatan juga lebih berperan dalam mengembangkan pola ideal perwujudan kehidupan religius dan kerukunan antar umat bergama, selain dapat mengembangkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, khususnya pada pengembangan demokrasi, dalam substansi dan konteks yang sesuai dengan cara dan karakter Sulawesi Selatan.

Kedua, Simpul Jejaring adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan luar pulau Jawa, pusat pelayanan barang dan jasa, hubungan pendidikan, hubungan kesehatan, serta hubungan perhubungan darat, laut dan udara. Dengan posisi demikian, Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

Ketiga, Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang proses dan hasil perubahan pada masyarakat Sulawesi Selatan melalui pengelolaan keragaman modal manusia, sosial, budaya, alam, fisik, dan finansial sehingga dapat mempercepat perwujudan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan

dan berkelanjutan. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita lebih dari Rp.30 juta, angka pengangguran dan angka kemiskinan berada di bawah rata-rata nasional. Agroindustri berkembang pesat sebagai kelanjutan dari perkembangan agribisnis, sementara industri manufaktur dan pertambangan akan berkontribusi signifikan dalam struktur perekonomian. Kondisi ini merupakan fase akhir era tinggal landas dan merupakan awal kematangan ekonomi yang sudah menunjukkan terbentuknya kelas menengah dan *civil society* dengan jumlah yang signifikan.

3.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2013-2018 adalah:

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama;
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun keterkaitan antara Misi, kebijakan daerah dengan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah:

MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

Kebijakan 16 : Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus (penerbangan, *pramugari*, SMK Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan melanjutkan beasiswa S2 dan S3)

Kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan:

- Peningkatan kualitas pelayanan melalui jejaring kerjasama kediklatan

MISI VII : Meningkatkan Perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih

Kebijakan 43 : Peningkatan akuntabilitas dan kompetensi aparatur

Kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan:

- Peningkatan kualitas pelayanan kediklatan melalui penerapan system manajemen mutu (SMM)

Tabel 3.2

Visi adalah Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur	- Masih terbatasnya sarana dan prasarana kediklatan	– Tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi	- Tingkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasaran
	Program : - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD.			
2	Misi 7 Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih	– Kurangnya sumberdaya manusia baik dari sisi jumlah pegawai maupun dari sisi kemampuan pegawai hal ini dirasakan di tingkat provinsi dan hampir disetiap Badan Diklat kabupaten / kota di Sulawesi selatan – Masih kurangnya dukungan anggaran dari APBD provinsi dan Kabupaten / kota dalam menunjang tugas dan tanggung jawab Badan Diklat di Provinsi dan kabupaten / kota se	Kurangnya pemahaman sejumlah kepala daerah di kabupaten / kota terhadap tugas pokok dan fungsi badan diklat provinsi sulawesi selatan	Adanya undang undang, permendagri dan Peraturan LAN yang menunjuk langsung badan Diklat sebagai pelaksana kediklatan sehingga daerah wajib melaksanakan
	Program : – Pembinaan dan Pengembangan Aparatur – Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur – Peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD – Peningkatan kapasitas proofesionalisme SDM			

		Sulawesi selatan – Masih sulitnya kordinasi antara badan Diklat Provinsi Sulawesi selatan dengan kabupaten / kota di karenakan otonomi daerah dimana provinsi tidak memiliki wewenang terhadap kabupaten / kota		
--	--	--	--	--

3.2.3 Kebijakan Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Terdapat 11 (sebelas) program yang akan diwujudkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2013-2018. Kesebelas program tersebut adalah:

1. Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
2. Gratis Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan;
3. Gratis Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil;
4. Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa;
5. Membangun Industri baru 24 unit (satu kabupaten satu industri) di seluruh kabupaten/Kota;
6. Membuka 500 (lima ratus) ribu lapangan kerja baru;
7. Gratis paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin;
8. Melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat SMA;
9. Melanjutkan kesehatan gratis;
10. Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus seperti penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3;
11. Gratis Peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui Boarding School untuk guru SD, SMP, SMA, guru mengaji, mubaliq, khatib dan alim ulama.

Terdapat beberapa item program sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut yang mana program tersebut bertujuan untuk peningkatan kompetensi atau sumber daya manusia yang handal. Untuk mendukung program ini Badan Pendidikan

dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RENSTRA 2013-2018 telah menyusun Program Peningkatan Kapasitas Profesionalitas SDM (Sumber Daya Manusia),

Indikator kinerja dari program ini adalah tercapainya tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), yang diukur melalui:

- a. Jumlah Alumni diklat;
- b. Persentase meningkatnya atau tercapainya tingkat kompetensi peserta sesuai yang dipersyaratkan

3.3. Keterkaitan Dengan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Arah kebijakan dan strategi kementerian tahun 2010 – 2014 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Tahap kedua tahun 2010-2014, yaitu memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian, serta keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Kementerian Dalam Negeri Lima Tahun Kedepan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Tujuan umum penataan ruang wilayah Provinsi adalah untuk menata ruang wilayah Sulawesi Selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran sungai, secara sinergis antar sektor maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang, dalam sistem tata ruang wilayah nasional, yang bermuara pada proses

peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga Sulawesi Selatan secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. mengembangkan fungsi Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Sulawesi Selatan sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Sulawesi Selatan, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut dan udara, serta terpadu antara wilayah Kabupaten/kota;
- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah Kabupaten/kota yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Provinsi, penyusunan RPJMD Provinsi;

- h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan\ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
- i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi, sasaran dan program selama lima tahun kedepan Renstra SKPD 2013- 2018 ini diperlukan metode penentuan isu-isu strategis sehingga dapat diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya kompetensi aparatur yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan publik
- 2) Peningkatan daya saing
- 3) Reformasi kediklatan
- 4) Diklat berbasis kompetensi
- 5) Learning Organization atau organisasi pembelajaran

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, NILAI, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

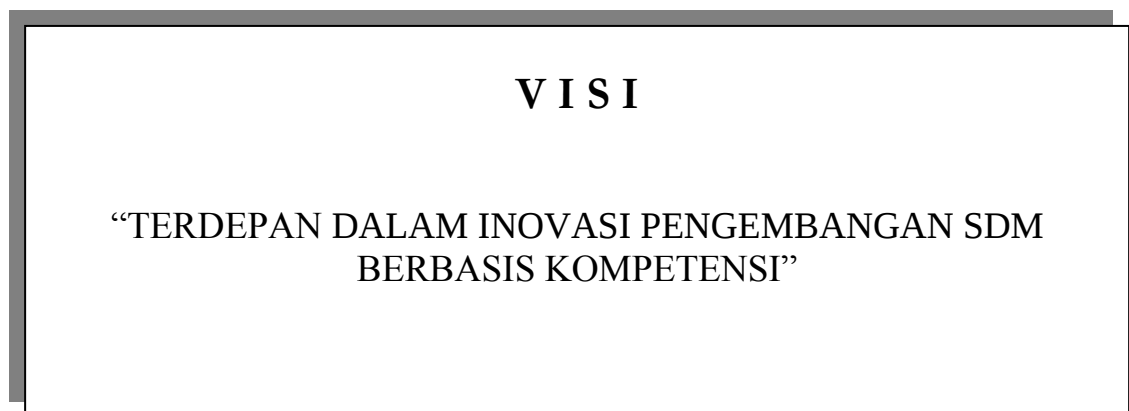
Sebagai kelengkapan dari penyusunan Renstra Badan Diklat Propinsi Sulawesi Selatan, maka berikut ini dipaparkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan.

Menyikapi berbagai dinamika perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, Sulawesi Selatan bertekad menjadi wilayah terkemuka di Indonesia melalui pendekatan kemandirian lokal yang bernapaskan keagamaan pada tahun 2028, olehnya itu semua tatanan yang ada perlu menyikapi secara cermat dan bijaksana.

Untuk maksud tersebut tatanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertekad mewujudkannya yang dapat dibuktikan melalui pernyataan Visi yakni ***“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”*** dan telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Beranjak dari visi tersebut yang merupakan landasan perumusan Visi dan Misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

4.1. VISI dan Misi

A. VISI



Penyataan Visi ini mengandung pengertian sebagai berikut :

- ☞ **Terdepan** adalah suata gambaran posisi/tempat yang secara obyektif dan elegan hendak dicapai di masa yang akan datang oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan.
- ☞ **Inovasi** adalah Kegiatan perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam produk barang dan/atau jasa.

- ☞ **Pengembangan adalah** suatu proses perubahan secara bertahap kearah tingkat yang berkecenderungan lebih tinggi dan meluas danmendalam yang secara menyeluruh dapat tercipta suatu kesempurnaan atau kematangan.
- ☞ **Kompetensi** adalah Kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut diatas maka ditetapkan misi sebagai berikut :

M I S I

1. Mewujudkan perencanaan program diklat berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis teknologi informasi.
3. Memperluas jejaring kerja dengan stakeholder.
4. Mewujudkan komitmen terhadap regulasi kediklatan.

4.2.TUJUAN dan SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

4.2.1. TUJUAN

Penetapan tujuan dan sasaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan faktor-faktor prioritas isu-isu strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan maka ditetapkanlah tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan perencanaan diklat yang berbasis kompetensi

2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis teknologi informasi (IT)
3. Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder
4. Melaksanakan kediklatan sesuai dengan regulasi kediklatan

4.2.2. SASARAN

Dalam rangka pencapaian berbagai tujuan yang diharapkan maka ditentukanlah sasaran yang diinginkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi
- 2) Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia
- 3) Terwujudnya kerjasama yang sinergis dengan stakeholder
- 4) Terwujudnya diklat sesuai regulasi

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menghasilkan perencanaan diklat yang berbasis kompetensi	Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi	- Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi	80%	85%	87%	90%	95%
			- Jumlah jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/ silabus	60%	65%	70%	75%	80%
2	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis teknologi informasi (IT)	Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	- Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan MEMUASKAN per tahun	65%	67%	70%	75%	80%
			- Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan	80%	85%	87%	90%	95%
			- Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian	87%	90%	92%	95%	97%
			- Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian	87%	90%	92%	95%	97%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			- Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat	65%	67%	70%	75%	80%
3	Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder	Terlaksananya kerjasama sinergis dengan stakeholder	Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder	24 MoU / PKS / KSO	25 MoU / PKS / KSO	26 MoU / PKS / KSO	27 MoU / PKS / KSO	28 MoU / PKS / KSO
4	Melaksanakan kediklatan sesuai dengan regulasi kediklatan	Terwujudnya diklat sesuai regulasi	Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina	75%	80%	85%	87%	90%

4.3. STRATEGI dan KEBIJAKAN

4.3.1. STRATEGI

1. Lingkungan Internal

Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi, sasaran dan program selama lima tahun kedepan RENSTRA SKPD 2013-2018 ini menggunakan telaahan SWOT. Telaahan ini menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

a. Beberapa kekuatan (Strength) yang digunakan, antara lain:

1. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kuantitas SDM Aparatur yang cukup memadai.
3. Adanya Akreditasi Program Diklat Prajabatan, Kepemimpinan Tk. IV dan Tk. III dari Instansi Pembina.
4. Adanya dukungan pimpinan dalam upaya peningkatan kompetensi SDM.
5. Adanya Standar Manajemen Mutu (SMM) dalam penyelenggaraan diklat
6. Adanya dukungan APBD

b. Beberapa Kendala/kelemahan (weakness) yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana kediklatan.
2. Rendahnya anggaran terhadap kebutuhan penyelenggaraan diklat.
3. Jumlah widyaiswara belum memadai.
4. Kualitas widyaiswara belum optimal
5. Rendahnya kedisiplinan, motivasi dan budaya kerja aparatur
6. Rendahnya jejaring kerjasama kediklatan dengan instansi dan lembaga lain

2. Lingkungan Eksternal

a. Beberapa Peluang (Opportunities) yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Adanya Kepercayaan pengelola Lemabaga diklat Kab/Kota
2. Kerjasama/kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat dan pihak luar negeri serta pihak ketiga yang terkait dalam pengembangan SDM.
3. Pemanfaatan IT untuk pengembangan program kediklatan.
4. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu.
5. Penerapan terhadap beberapa regulasi di bidang kediklatan
6. Adanya kebijakan training rate bagi PNS.

b. Beberapa tantangan/ancaman (Threats) yang digunakan, antara lain:

1. Masih adanya lembaga diklat pusat/sektoral yang menyelenggarakan diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional
2. Masih adanya persaingan lembaga diklat non pemerintah yang menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional
3. Lemahnya tingkat kepatuhan unit kerja terhadap regulasi kediklatan
4. Rendahnya konsistensi instansi Pembina diklat terhadap lembaga diklat di daerah
5. Belum tersusunnya jenis dan jenjang kompetensi khusus lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
6. Tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi

Untuk lebih memahami tentang kebijakan dan kaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dapat dilihat di table IV.2. dibawah ini :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERDEPAN DALAM INOVASI PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI			
MISI I : Mewujudkan Perencanaan Program Diklat Berbasis Kompetensi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menghasilkan perencanaan diklat berbasis kompetensi	Tersusunnya program diklat berbasis kompetensi	Tingkatkan jumlah dan jenis akreditasi program diklat untuk meningkatkan kepercayaan pengelolaan lembaga diklat	Pengembangan jumlah dan jenis akreditasi program diklat
MISI II : Mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang Berbasis Sitim Manajemen Mutu (SMM) dan Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	Optimalkan keterbatasan anggaran untuk mengantisipasi adanya lembaga diklat pusat/sektoral yang menyelenggarakan diklat kepemimpinan, teknis & fungsional	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya kediklatan
MISI III : Memperluas Jejaring Kerja dengan Stakeholder			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder	Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder	Perluas jejaring kerjasama kediklatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan melalui jejaring kerjasama kediklatan
MISI IV : Mewujudkan Komitmen Terhadap Regulasi Kediklatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Melaksanakan kediklatan sesuai dengan regulasi kediklatan	Terwujudnya diklat sesuai regulasi	Tingkatkan kualitas widyaiswara dan penyelenggara untuk menerapkan regulasi bidang kediklatan	Pengembangan kualitas widyaiswara dan penyelenggara untuk memenuhi regulasi kediklatan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1.1. RENCANA PROGRAM

Program dan kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Sulsel selama lima tahun Renstra (2013 – 2018), dirancang sebanyak enam buah program, meliputi:

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk penyediaan sarana kelengkapan kebutuhan pelayanan administrasi kantor, barang, pengelolaan multimedia pembelajaran dalam upaya peningkatan kapasitas dan integritas sebagai lembaga diklat yang terakreditasi, sehingga dapat diwujudkan profesionalisme dan kemandirian Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam mengelola kediklatan sesuai yang standar yang dipersyaratkan.

2). Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Program ini diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan Sumberdaya Manusia, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kediklatan dalam upaya pemenuhan kelayakan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan sebagai lembaga diklat terakreditasi serta mantapnya sarana dan prasarana untuk dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga pelayanan kelembagaan dapat lebih berkualitas dan terpercaya sebagai lembaga pengelola kediklatan yang professional dan mandiri.

3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Program ini diarahkan untuk penyediaan dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan terhadap seluruh program/kegiatan yang telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan, penyusunan laporan tahunan kediklatan dan bahan LKPJ Gubernur, Laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) dan LPPD yang merupakan dokumen Akuntabilitas Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penyusunan program ini mengacu pada kesesuaian antara jenis dan jenjang program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintah daerah serta sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern. Selain itu program ini juga diharapkan dapat menyeimbangkan kegiatan program diklat yang dipersiapkan bagi pejabat struktural, fungsional dan kemampuan teknis pada organisasi pemerintahan. Dengan adanya kesesuaian ini diharapkan diklat akan dapat meningkatkan kompetensi SDM yang memberikan kontribusi lebih besar dalam perbaikan kinerja dan produktifitas pegawai. Selanjutnya jenis program diklat yang dikembangkan tersebut dikategorikan kedalam beberapa rumpun diklat yaitu Diklat Teknis, Diklat Fungsional, serta Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan.

5). Program Pembinaan dan Pengembangan Kediklatan

Program ini diarahkan untuk mengantisipasi dinamika perubahan manajemen kediklatan yang selama ini cenderung tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 menyebabkan bergesernya orientasi penyelenggaraan diklat baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jika mengacu kepada filosofi dan esensi dari UU tersebut maka pada akhirnya tingkat muara kewenangan pemerintah akan lebih banyak berada di daerah termasuk di bidang pendidikan dan pelatihan sehingga Pemerintah Provinsi mempunyai peran yang signifikan dalam proses aliran kewenangan tersebut. Kewenangan di bidang diklat yang belum atau tidak dilaksanakan oleh kabupaten/kota karena keterbatasan sumberdaya, akan menjadi kewenangan provinsi sebagai fungsi fasilitasi disamping kewenangan untuk melaksanakan diklat tertentu utamanya diklat yang sifatnya baru dan diklat yang mempunyai muatan kompetensi wawasan kebangsaan. Kondisi ini akan mengakibatkan pergeseran pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang selama ini lebih berorientasi pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ke pengembangan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan. Orientasi ke arah pengembangan program ini menghendaki adanya upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk melakukan kajian dan mengembangkan berbagai jenis dan kurikulum program diklat

beserta desain instruksional dan modul pembelajaran, termasuk diklat spesifik/local, sesuai dengan analisis kebutuhan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya yang relevan dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan memperhatikan Keputusan Kepala BKN No. 46 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dilingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan sistem satu pintu di Provinsi Sulawesi Selatan dan pedoman lainnya yang ditetapkan oleh instansi Pembina. Disamping itu perlunya kerjasama/kolaborasi yang sinergi dengan berbagai pihak antara lain Perguruan Tinggi, LSM ataupun komponen masyarakat lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam pelaksanaan maupun pengembangan program kediklatan utamanya dalam menetapkan program diklat baru berbasis kompetensi yang berorientasi untuk dapat mengatasi permasalahan kinerja yang dihadapi pada tingkat pemerintahan/unit kerja daerah dengan merumuskan kompetensi yang tidak/kurang dikuasai yang dijadikan dasar untuk pengembangan sistem pembelajaran dan rumusan tujuan diklat secara tentative. Sementara itu untuk menciptakan tolok ukur yang sama sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik daerah dalam penyelenggaraan program-program kediklatan, maka perlukan upaya-upaya standarisasi, analisis serta monitoring dan evaluasi kediklatan, agar standar kualitas hasil pelaksanaan diklat tetap dapat terjaga sesuai dengan norma dan standar penyelenggaraan diklat secara umum dan dapat diterapkan secara praktis dilapangan.

6). Program Peningkatan Kapasitas Profesionalitas SDM

Penyusunan program ini mengacu pada program prioritas pemerintah provinsi sulsel dalam peningkatan sumber daya manusia agar dapat memiliki kompetensi, kapasitas dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan.

5.1.2. KEGIATAN.

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya efektivitas pelayanan administrasi perkantoran dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1 Pelayanan Aparatur dan Kelembagaan
- 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 3 Peningkatan Pengelolaan Multimedia Terapan
- 4 Peningkatan Pengelolaan Media Instruksional dan Penilaian Kompetensi

2). Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD

Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Pengembangan SDM Aparatur
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Badan Diklat
3. Peningkatan Kinerja Pegawai Badan Diklat
4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Gedung kantor dan asrama
6. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
7. Pemeliharaan Gedung Pusat Pelatihan Pramugari

3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Menyediakan informasi, data dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi program kegiatan (Forum SKPD)
2. Peningkatan perencanaan program kerja Badan
3. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan
4. Penyusunan dokumen keuangan Badan
5. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
6. Penyusunan laporan kinerja Badan Diklat
7. Penyusunan LAKIP dan LPPD badan diklat

4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya kualitas kapasitas aparatur dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rumpun Diklat Struktural
2. Penyelenggaraan Rumpun Diklat Teknis
3. Penyelenggaraan Rumpun Diklat Fungsional
4. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat kepemimpinan Tk.III & IV kab/kota se Sulsel
5. Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat prajabatan golongan III,II & I kab/kota se sulsel
6. Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat teknis kab/kota se sulsel
7. Pembinaan Fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat fungsional kab/kota se sulsel
8. Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/ Kursus-kursus singkat

5). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Program sinkronisasi kediklatan
2. Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi kediklatan
3. Analisis kebutuhan diklat (AKD)
4. Penyusunan desain dan pengembangan modul pembelajaran diklat
5. Fasilitasi dan kerjasama program kediklatan
6. Promosi dan publikasi kediklatan
7. Monitoring dan evaluasi kediklatan kab/kota
8. Monitoring dan evaluasi kediklatan (in diklat dan pasca diklat)
9. Evaluasi Kompetensi Dasar SDM Aparatur
10. Pembentukan Assesment Center

6). Program Peningkatan Kapasitas Profesionalitas SDM

Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya kapasitas profesionalitas SDM dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan Kepramugarian

5.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 terdapat 6 Program dengan indikator kinerja (Outcome) sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan indikator kinerja (outcome) adalah Meningkatnya efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
Dengan indikator kinerja (outcome) Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD
Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Menyediakan informasi, data dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya kualitas kapasitas aparatur
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Profesionalitas SDM
Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya kapasitas profesionalitas SDM

5.3. KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 memuat 4 sasaran dan program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dengan rincian pendanaan selang 5 Tahun sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi
 - a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp.8.270.529.000,-**
2. Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia
 - a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp. 38.754.739.700,-**

3. Terwujudnya kerjasama sinergis dengan stakeholder
 - a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp.4.167.942.500,-**
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp.2.612.358.100,-**
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Profesionalitas SDM dengan anggaran sebesar **Rp. 4.929.663.400,-**
4. Terwujudnya penyelenggaraan diklat sesuai regulasi
 - a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp. 38.754.739.700,-**

Tabel 5. 1

Matriks Perencanaan Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013-2018

Kebijakan Umum dan Program RPJMD Pemerintah Provinsi	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan
1. Peningkatan akuntabilitas dan kompetensi aparatur 2. Gratis biaya Pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus (Penerbangan, Pramugari , SMK Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan melanjutkan beasiswa S2 dan S3)	Terdepan Dalam Inovasi Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi	1. Mewujudkan perencanaan program diklat berbasis kompetensi	Menghasilkan perencanaan diklat yang berbasis kompetensi	Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi	Tingkatkan jumlah dan jenis akreditasi program diklat untuk meningkatkan kepercayaan pengelolaan lembaga diklat	Pengembangan jumlah dan jenis akreditasi program diklat	Peningkatan kapasitas pengembangan SDM	1) Penyusunan Program sinkronisasi kediklatan 2) Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kediklatan. 3) Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 4) Monitoring dan Evaluasi Kediklatan. 5) Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Kab/Kota. 6) Penyusunan Desain dan Pengembangan Modul Pembelajaran Diklat 7) Evaluasi Kompetensi Dasar SDM Aparatur 8) Pembentukan Assesment Center
		2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	Optimalkan keterbatasan anggaran untuk mengantisipasi adanya lembaga diklat pusat/sektoral yang menyelenggarakan diklat kepemimpinan, teknis & fungsional	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya kediklatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1) Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan. 2) Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis. 3) Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional 4) Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-kursus Singkat.

Kebijakan Umum dan Program RPJMD Pemerintah Provinsi	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan
		3. Memperluas jejaring kerja dengan stakeholder	Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder	Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder	Perluas jejaring kerjasama kediklatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan melalui jejaring kerjasama kediklatan	1. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2. Program peningkatan kapasitas profesionalisme SDM 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1. Fasilitasi dan kerjasama program kediklatan 2. Pomosi dan Publikasi Kediklatan 1) Pelatihan Kepramugarian 1) Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III & IV kab/kota se sulsel 2) Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat prajabatan golongan III, II & I kab/kota se sulsel 3) Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat teknis kab/kota se sulsel 4) Pembinaan Fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat fungsional kab/kota se sulsel
		4. Mewujudkan komitmen terhadap regulasi kediklatan.	Melaksanakan kediklatan sesuai dengan regulasi kediklatan	Terwujudnya diklat sesuai regulasi	Tingkatkan kualitas widyaiswara untuk menerapkan regulasi bidang kediklatan	Pengembangan kualitas widyaiswara dan penyelenggara untuk memenuhi regulasi kediklatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1) Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan. 2) Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis. 3) Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional 4) Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-kursus Singkat.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat 6 Program dan 40 kegiatan merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan dari RENSTRA Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018, dimana penjabaran tersebut melalui berbagai tahapan pembahasan yang diharapkan dapat mewujudkan Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan indikator yang merupakan Indikator yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun hasil dari penjabaran tersebut diatas dituangkan kedalam 9 (sembilan) indikator yakni:

1. Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi
2. Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/ silabus
3. Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan Memuaskan
4. Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan
5. Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian
6. Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian
7. Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat
8. Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder
9. Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina

Tabel 6.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi	80%	80%	85%	87%	90%	95%	95%
2.	Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/ silabus	60%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
3.	Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan Memuaskan	65%	65%	67%	70%	75%	80%	80%
4.	Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan	80%	80%	85%	87%	90%	95%	95%
5.	Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian	87%	87%	90%	92%	95%	100%	100%
6.	Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian	87%	87%	90%	92%	95%	100%	100%
7.	Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat	65%	65%	67%	70%	75%	80%	80%
8.	Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder	24 MoU / PKS / KSO	24 MoU / PKS / KSO	25 MoU / PKS / KSO	26 MoU / PKS / KSO	27 MoU / PKS / KSO	28 MoU / PKS / KSO	28 MoU / PKS / KSO
9.	Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina	75%	75%	80%	85%	87%	90%	90%

BAB VII

P E N U T U P

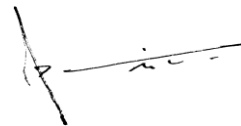
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan strategik Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan kesadaran manajerial untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang dalam bidang pengembangan Sumberdaya Manusia . Perumusan Perencanaan Strategik sebagai upaya mengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan masa kini, maupun dimasa mendatang dengan peran serta semua *stakeholder* pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia.

Perencanaan stretgik ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu 2013-2018 yang akan dijabarkan secara detail dan kongkrit dalam program tahunan perencanaan strategik. Keberhasilan perencanaan srtategik ini dapat dicapai bila mana semua faktor sumberdaya pendukung dapat terpenuhi.

Makassar, Oktober 2015

KEPALA BADAN,



H. IRMAN YASIN LIMPO, SH

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19670824 199403 1 008